

BAB V

REFLEKSI ANALITIS

A. Realitas Pendidikan dan Kurikulum di Indonesia

1. Problematika Pendidikan

Pemerintah telah mempercepat pencaanangan *Millennium Development Goals*, yang semula dicanangkan tahun 2020 dipercepat menjadi 2015. *Millennium Development Goals* adalah era pasar bebas atau era globalisasi, sebagai era persaingan mutu dan kualitas, siapa yang berkualitas dialah yang akan maju dan mampu mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal tersebut mutlak diperlukan, karena akan menjadi penopang utama pembangunan nasional yang mandiri dan berkeadilan, *good governance and clean governance*; serta menjadi jalan keluar bagi bangsa Indonesia dari multidimensi krisis, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat membanggakan, baik di darat, laut, bahkan di udara, hanya saja masyarakat dan generasinya belum memiliki kemampuan berpikir (*thinking skill*) yang memadai. Harian *Pikiran Rakyat* (26 Juli 2006: 12) mengemukakan data “word in Figure”, katanya Indonesia penghasil lada putih, buah pala, dan kayu lapis nomor satu di dunia, penghasil karet alam

dan sentetik serta timah kedua di dunia, serta penghasil tembaga, batu bara, minyak bumi, dan ikan yang masuk dalam jajaran 10 besar dunia.

Katanya, penduduk Indonesia saat ini sudah lebih dari 220 juta jiwa, juga dikenal sebagai Negara penghasil sumber daya alam (SDA) yang memiliki 325-350 jenis flora dan fauna. Katanya Negara Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa, memiliki tanah yang subur, sehingga “orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan bambu jadi tanaman”. Hal ini berarti Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh negara lain, namun belum unggul secara kompetitif.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia mestinya menjadi negara yang makmur dan sejahtera, serta gemah ripah lohjinawi, bukan sebaliknya menjadi Negara yang terpuruk dalam krisis dan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan ketidakpastian menghadapi masa depan, belum lagi ditambah dengan kerusakan lingkungan hidup sebagai ulah manusianya, yang diperparah oleh banyaknya gempa yang terjadi dan bahkan tsunami.

Pikiran Rakyat juga mengemukakan bahwa, ditingkat dunia Indonesia termasuk Negara penghutang (*debitor*) nomor 6, Negara terkorup nomor 3, peringkat SDM ke 112 dari 127 negara, dengan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 30 % dan pengangguran terbuka mencapai 12 juta. Akar masalah tersebut, adalah factor politik dan keamanan yang tidak mendukung, penegakan hukum yang tidak konsisten, iklim investasi yang kurang kondusif, serta birokrasi

pemerintahan yang berbelit; disamping semrawutnya manajemen sistem pendidikan nasional, sebagai lembaga yang bertugas menyiapkan SDM. Inilah tantangan Indonesia dalam memasuki *mellinium goals*, era globalisasi, dan era informasi.

Percepatan arus informasi dalam arus globalisasi dewasa ini menuntut semua bidang kehidupan untuk menyesuaikan visi, misi, tujuan, dan strateginya agar sesuai dengan kebutuhan, dan tidak ketinggalan zaman. Penyesuaian tersebut secara tidak langsung mengubah tatanan dalam sistem makro, meso, maupun mikro, demikian halnya dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat local, nasional, maupun global.

2. Perlunya Perubahan Kurikulum

Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara; khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, sejak Indonesia mempunyai kebebasan menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, sejak itu pula pemerintah menyusun kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dibuat oleh pemerintah sentralistik, dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia.

Karena kurikulum dibuat secara sentralistik, setiap satuan pendidikan diharuskan untuk melaksanakan dan mengimplementasikannya sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh pemerintah pusat menyertai kurikulum tersebut. Dalam hal ini, setiap sekolah tidak menjabarkan kurikulum tersebut di sekolah masing-masing, dan biasanya yang banyak kepentingan adalah guru. Tugas guru dalam kurikulum yang sentralistik ini adalah menjabarkan kurikulum yang dibuat oleh pusat (pusat kurikulum/puskur, sekarang Badan Standar Nasional Pendidikan) ke dalam satuan pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing.

Meskipun demikian, mengingat, menyadari dan memperhatikan kondisi pendidikan beberapa tahun terakhir ini, sepertinya ada kejanggalan berkaitan dengan kurikulum. Pertanyaannya, apakah setiap satuan pendidikan, pengelola, dan penyelenggara pendidikan, serta guru dan kepala sekolah sudah menjadikan kurikulum sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? Sampai sejauh mana pemahaman mereka terhadap kurikulum yang dikembangkan oleh pusat? Bagaimana mereka mengembangkan kemampuan kreativitasnya untuk menjabarkan kurikulum dan melaksanakannya dalam pembelajaran?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangat bervariasi, karena sejauh penelusuran Penulis tidak ada hasil penelitian tentang hal tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, berbagai kasus menunjukkan kurangnya pemahaman para penyelenggara, dan para

pelaksana, termasuk guru dan kepala sekolah terhadap kurikulum, bahkan tidak sedikit guru dan instruktur yang tidak tahu kurikulum. Kelompok guru A misalnya melaksanakan pembelajaran berdasarkan urutan bab dalam buku teks, dan menggunakan buku teks sebagai satu-satunya acuan dalam mengajar. Inilah yang sering membuat guru kelabakan dan sering kekurangan waktu dalam mengajar, karena buku teks biasanya dirancang lebih dari target minimal sebuah kurikulum, yang menuntut penyesuaian guru di sekolah; dan disinilah pentingnya guru memahami kurikulum, sehingga paham konsep-konsep mana yang harus diajarkan secara keseluruhan, dan mana yang bisa dikurangi bahkan diabaikan.

Kekurangpahaman guru dan penyelenggara pendidikan terhadap kurikulum bisa berakibat fatal terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini terbukti, ketika mereka dihadapkan pada ujian nasional, mereka sering kelabakan, dan sering ketakutan, takut kalau-kalau peserta didik di sekolahnya tidak bisa mengerjakan soal-soal ujian dan tidak lulus. Biasanya mereka saling menyalahkan, dan sering mencari “kambing hitam” untuk menutupi kesalahannya. Lebih parahnya lagi, sebagian dari mereka tidak sanggup menghadapi kenyataan, lantas memutarbalikkan fakta, yang ujung-ujungnya menyalahkan peraturan. Kelompok ini sampai sekarang ini masih bersikukuh untuk menghapus ujian nasional, tanpa memberikan jalan keluarnya, dan inilah yang sering menghambat pendidikan nasional.

Rasional saja, kita hidup dalam negara kesatuan, yang terdiri dari berbagai suku, dan terletak di berbagai pulau, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bagaimana bisa mengetahui keberhasilan pendidikan secara nasional yang mencakup seluruh suku di berbagai tempat kalau tidak diadakan penelitian secara nasional; bagaimana bisa tahu kalau pendidikan di suatu daerah lebih baik dari daerah lainnya, tanpa ada standar penilaian secara nasional. Memang diakui dalam manajemen berbasis sekolah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan diberikan kepada sekolah, tetapi bukan berarti seluruh peran pusat/sentral dihapuskan.

Kepentingan pendidikan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu bisa dilakukan bukan dalam bentuk ujian tetapi dalam penilaian, penilaian nasional. Dengan demikian, ujian nasional yang sampai sekarang masih terus dilaksanakan perlu diganti dengan penilaian nasional, sehingga strategi, proses penyelenggaraan, dan penggunaan hasilnya juga perlu disesuaikan dan disempurnakan. Kita tidak bisa menghapus penilaian nasional, karena itu bukan hanya kepentingan politik, tetapi menyangkut kepentingan bersama, kepentingan anak bangsa diseluruh Nusantara, agar mereka bersatu dan bisa menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Lebih dari itu, agar Negara tidak porak poranda hanya karena penyelenggaraan pendidikan yang berbeda, dan jurang perbedaan ini hanya bisa ditutup dengan suatu sistem penilaian, sehingga kita tahu mana yang harus di tambah dan mana yang harus

dikurangi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana meningkatkan pemahaman guru dan penyelenggara pendidikan lainnya terhadap kurikulum, sehingga mereka bisa menjadikan kurikulum tersebut sebagai acuan dalam pembelajaran. Jika kurikulum sudah dijadikan acuan dalam pembelajaran, kemudian materi ujian dikembangkan dari kurikulum yang diberlakukan dengan benar maka tidak ada alasan peserta didik gagal ujian, kecuali bagi mereka yang malas atau memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Jika bukan itu, maka perlu dipertanyakan apakah gurunya sudah mengajar sesuai dengan tuntunan kurikulum, dan apakah kurikulum sudah dijadikan acuan serta pedoman oleh setiap satuan pendidikan ? Inilah salah satu jawaban mengapa peserta didik yang gagal dalam mengikuti ujian, disamping masih banyaknya jawaban lain tentunya.

Semua permasalahan sebagaimana yang diilustrasikan di atas akan bermuara pada hubungan yang harmonis antara kurikulum dan guru sebagai pelaksana. Barangkali kurangnya hubungan yang harmonis antara guru dengan kurikulum menyebabkan gagalnya peserta didik dalam ujian, bahkan bisa menjadi sebab terpuruknya pendidikan nasional. Lebih parah lagi, jika guru tidak memiliki etika yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, atau sudah kehilangan idealismenya, maka mereka akan mencari berbagai cara untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, atau untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Misalnya membocorkan soal ujian, atau bahkan memberikan kunci jawaban kepada peserta didiknya. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan berakibat

fatal terhadap perkembangan peserta didik, lebih dari itu peserta didik tidak akan percaya lagi kepada guru, sia-sia saja usaha mereka selama bertahun-tahun. Terlebih lagi akibat dari itu adalah rusaknya moral dan mental peserta didik. Menurut Penulis, ini yang harus dipikirkan matang-matang, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang lagi di masa depan. Apalagi sekarang, bahwa pemerintah telah menetapkan standar kompetensi dan standar isi, untuk dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

B. Kesiapan Implementasi KTSP di Satuan Pendidikan

1. Kesiapan materiil (sumber daya alamiah sekolah)

a). Perangkat kurikulum

Perangkat kurikulum merupakan merupakan sarana penunjang dalam pencapaian keberhasilan kegiatan pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk itu setiap guru dituntut untuk menyiapkan dan merencanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara optimal, maka terlebih dahulu guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1). mengkaji dan memahami struktur program kurikulum yang berlaku,
- 2). memahami tujuan pengejaran,
- 3). mengkaji materi pelajaran,
- 4). mengkaji dan mengembangkan berbagai metode pengajaran yang tercantum dalam kurikulum,
- 5). mengetahui tata urutan penyajian dan alokasi waktu yang tersedia,
- 6). mengkaji dan mengembangkan sarana

belajar mengajar, 7). mengkaji dan mengembangkan cara penilaian proses hasil belajar, 8). mengembangkan kurikulum dalam tahunan, program cawu, dan persiapan mengajar, 9). memahami buku pedoman dan dan petunjuk kurikulum, 10). memiliki buku referensi yang memadai, 11). mengembangkan dan memanfaatkan sumber belajar (Depdiknas, 1995).

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum menjadi silabus yang lebih operasional dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, maka sistem pembelajaran harus mengarah pada pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat dikatakan sebagai sistem pembelajaran di mana hasil belajar berupa kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa perlu dirumuskan terlebih dahulu secara jelas. Hasil belajar dimaksud berupa kompetensi yang mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor yang diharapkan dicapai sebagai hasil pembelajaran.

b). Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika

dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar dan mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan perlu dimanajemen dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses pendidikan di sekolah. Mulyasa (2002) mengatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga tercipta kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Disamping itu juga tersedianya alat-alat atau fasilitas yang memadai secara kuantitatif maupun kualitatif serta relevan dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid sbagai pelajar.

c). Keuangan

Mengenai sumber keuangan sekolah, Mulyana (2002) menjelaskan bahwa sumber keuangan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1). pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, baik yang bersifat umum maupun khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; 2). orang tua atau peserta didik; 3). masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat (1) bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Karena keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, maka menuntut sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

d). Lingkungan

Dimensi lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan social. Lingkungan fisik lebih cenderung dikaji dari sisi bangunan yang berada di sekitar sekolah, sedangkan lingkungan social dilihat dari kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan social sama-sama memberikan kontribusi yang positif bahkan berkolerasi positif karena jika sekolah berada di lingkungan yang kumuh artinya dari sisi bangunan tidak tertata dengan baik dan kondisi lingkungan social yang ramai, bising, tidak teratur akan mengganggu kenyamanan dalam kegiatan pendidikan di sekolah sehingga akan mengurangi semangat belajar baik guru maupun siswa.

2. Kesiapan nonmateriil (sumber daya manusia sekolah)

Bentuk kesiapan nonmateriil sekolah atau sumber daya manusia sekolah dapat dilihat dari dimensi kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua.

a). Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah

Tugas seorang pemimpin atau kepala sekolah menyangkut bagaimana kepala sekolah bertanggungjawab atas sekolahnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bagaimana mengelola berbagai masalah yang menyangkut pelaksanaan administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan maupun pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah.

Kaitannya dengan tugas dan fungsi kepala sekolah Permadi (1999) sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kepala sekolah mempunyai fungsi sebagai *educator* (guru), *manager* (pengarah, penggerak sumber adaya), *administrator*, *supervisor* (pengawas, pengorekri dan melakukan evaluasi).

Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengarahkan dan memamnfat segala sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan proses belajar di sekolah. Guna mewujudkan tanggung jawab tersebut maka kepala sekolah sangat berperan dalam mengendalikan keberhasilan kegiatan pendidikan, meningkatkan pelaksanaan administrasi sekolah sesuai dengan pedoman,

meningkatkan keterlaksanaan tugas tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan pendidikan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.

Mulyana (2002) memberikan pengertian kepemimpinan kepala sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting karena kepemimpinan dalam hal ini berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru baik secara individu maupun kelompok. Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja sama dalam kelompok dalam mewujudkan tujuan sekolah.

b). Guru dan karyawan

Dalam sisten dan proses pendidikan manapun, guru dan karyawan tetap memegang peranan penting karena siswa tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu mengembangkan tugasnya dengan baik.

Berkaitan dengan guru, Hamalik (2003) peranan guru sebagai fasilitator belajar bertitik tolak dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Maka guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi rencana-rencana yang operasioanal. Dalam hal ini guru berperan dalam mengembangkan kurikulum dalam bentuk rencana-rencana yang lebh operasional sperti silabus dan satuan pelajaran.

Kaitannya dengan implementasi kurikulum, maka guru perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut; (1). mengurangi metode ceramah, (2). memberikan tugas yang berbeda bagi peserta didik, (3).

mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, (4). bahan harus dimodifikasi dan diperkaya, (5). jangan ragu untuk berhubungan dengan spesialis bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan, (6). gunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan membuat laporan, (7.) ingat bahwa anak didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama, (8). usahakan mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada tiap pelajaran, (9). usahakan untuk melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan (Mulyasa, 2002).

Sedangkan tugas utama karyawan atau staf administrasi adalah membantu guru dan kepala sekolah tentang keadministrasian sekolah baik itu, perpustakaan, urusan kesiswaan, dan lain sebagainya. Antara guru dan karyawan tidak bisa dipisahkan dan masing-masing tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus saling mengisi satu dengan yang lain. Untuk itu, penciptaan iklim kerja yang kondusif sangat menentukan kelancaran dan kinerja yang baik.

c). Siswa

Siswa merupakan pihak yang akan menerima dan memperoleh kemampuan yang terumus dalam kurikulum tingkat satuan paendidikan. Dalam hal ini, siswa perlu diposisikan sebagai subyek dari implementasi kurikulum, sehingga kurikulum bukan diperuntukkan bagi guru, akan tetapi diperuntukkan bagi siswa. Untuk

itu, siswa dituntut mampu berpartisipasi secara aktif dalam menjabarkan, mengembangkan dan mengimplementasikan aspek-aspek kurikulum yang mendukung bagi terbentuknya suatu profil lulusan sebagaimana terumus dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa setiap siswa dituntut memiliki kemampuan-kemampuan; 1). kreatif dan inovatif dalam belajar, 2). menciptakan suasana kompetitif dalam belajar, 3). menghargai dan menghormati setiap warga sekolah, 4). mengikuti berbagai perubahan dan perkembangan iptek yang sedang terjadi di masyarakat untuk selanjutnya dibawa ke sekolah sebagai bahan masukan bagi peningkatan kualitas sekolah, dan 5). rasa memiliki terhadap berbagai program sekolah.

d). Orang tua

Orang tua dapat dikatakan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab bagi kesuksesan program-program sekolah. Artinya, keberhasilan sekolah sangat ditentukan seberapa jauh tingkat partisipasi orang tua terhadap implementasi program-program yang diselenggarakan sekolah. Ada korelasi antara kemajuan dan kualitas sekolah dengan tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya (Anik, 2003).

Kaitannya dengan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, orang tua dituntut berpartisipasi aktif dalam merancang dan mengembangkan program-program sekolah. Hal ini berarti pihak

orang tua; 1). memiliki kesadaran terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anaknya, 2). menyediakan berbagai fasilitas belajar yang diperlukan anaknya, 3). melakukan pertemuan rutin dengan pihak sekolah guna memikirkan dan mencari solusi terhadap berbagai problema yang dihadapi sekolah.

C. KTSP; Otonomi Madrasah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Fikih di Madrasah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berdampak pada sistem penyelenggaraan pendidikan dari sentralistik menuju desentralistik. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang terwujud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu substansi yang didesentralisasi adalah kurikulum. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada gilirannya mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan kurikulum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan perwujudan dari otonomi sekolah/madrasah. Memperbincangkan KTSP sebagai perwujudan otonomi sekolah/madrasah, maka kata kunci dari otonomi sekolah/madrasah itu adalah “kewenangan” dan “pemberdayaan”. Sekolah/madrasah diberi kewenangan dan tanggung jawab secara luas untuk mandiri dan berkembang

serta memberdayakan seluruh komponen terkait berdasarkan strategi kebijakan manajemen pendidikan yang diterapkan pemerintah.

Sehubungan dengan kewenangan dan pemberdayaan di atas, sekolah/madrasah membuat kurikulum yang disusun sendiri dan dilaksanakan sendiri (KTSP), dalam implementasinya perlu didukung oleh beberapa perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan sekolah/madrasah yang menyangkut aspek-aspek berikut:

1. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional

Implementasi KTSP memerlukan sosok kepala sekolah/madrasah yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas profesional yang tinggi, serta demokratis dalam pengambilan keputusan-keputusan mendasar. Pada umumnya, kepala sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai “manajer profesional”, karena sistem pengangkatan selama ini tidak didasarkan pada kemampuan atau pendidikan profesional, tetapi lebih pada pengalaman menjadi guru. Hal ini disinyalir pula oleh laporan Bak Dunia(1999), bahwa salah satu penyebab makin menurunnya mutu pendidikan di Indonesia adalah “kurang profesionalnya” para kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan KTSP memerlukan perubahan sistem pengangkatan kepala sekolah/madrasah dari pengangkatan karena kepangkatan atau pengalaman kerja sebagai guru kepada pengangkatan berdasarkan kemampuan dan keterampilan secara profesional.

Dalam implementasi KTSP, kepala sekolah/madrasah dituntut untuk memiliki visi dan wawasan yang luas tentang pembelajaran yang efektif dan kemampuan profesional yang memadai dalam bidang perencanaan, kepemimpinan, manajerial, dan supervise pendidikan. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan kurikulum.

2. Kemandirian guru

Kemandirian guru sangat diperlukan dalam menghadapi dan memecahkan berbagai problem yang sering muncul dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus mampu mengambil tindakan terhadap berbagai permasalahan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kemandirian guru juga akan menjadi figur bagi peserta didik, sehingga mereka terbiasa untuk memecahkan masalah secara mandiri dan profesional. Oleh karena itu dalam rangka menyukseskan KTSP diperlukan kemandirian guru, terutama dalam melaksanakan, menyesuaikan, dan mengadaptasikan KTSP tersebut dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, implementasi KTSP yang ditunjang oleh kemandirian guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), yang bermuara pada peningkatan prestasi belajar peserta didik dan prestasi sekolah/madrasah secara keseluruhan.

3. Memberdayakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan organisasi guru, yang pada saat ini keberadaannya pada sebagian sekolah atau satuan

pendidikan kurang diberdayakan. Kebanyakan organisasi tersebut pada saat ini sudah tidak memiliki dan tidak melakukan program kerja yang sesuai dengan tujuan awal berdirinya. Tujuan MGMP adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Namun demikian dalam perjalanannya, kegiatan organisasi tersebut banyak yang perlu diluruskan. Misalnya organisasi tersebut hanya digunakan sebagai ajang arisan, bahkan tidak jarang organisasi tersebut hanya untuk membicarakan jadwal les bagi peserta didik menjelang ujian.

Beberapa sekolah/madrasah yang telah mengembangkan MGMP secara efektif pada umumnya dapat mengatasi berbagai kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa, bukan saja pada kegiatan belajar mengajar tetapi juga dalam kegiatan lainnya di sekolah, bahkan masalah pribadi pun dapat dipecahkan. Oleh karena itu, MGMP perlu diberdayakan kembali guna menupang peningkatan mutu pembelajaran pada khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya.

4. Revitalisasi partisipasi masyarakat dan orang tua siswa.

Secara historis sekolah/madrasah merupakan sistem pendidikan yang berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap eksistensinya. Namun dalam perkembangan berikutnya, terutama sekolah/madrasah yang dikelola oleh pemerintah (negeri) seolah-olah berada di luar masyarakat dan orang tua, sehingga partisipasi mereka menjadi pudar.

Dalam pengembangan KTSP, partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program sekolah/madrasah perlu dibangkitkan kembali. Wujud keterlibatan, bukan hanya dalam bantuan finansial, tetapi lebih dari itu, dalam pemikiran-pemikiran untuk peningkatkan kualitas pembelajaran. Masyarakat dan orang tua harus disadarkan bahwa sekolah/madrasah merupakan lembaga pendidikan yang perlu didukung oleh semua pihak. Prestasi keberhasilan sekolah harus menjadi kebanggaan masyarakat dan lingkungannya. Ini berarti, pelaksanaan KTSP memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, pihak sekolah/madrasah dalam hal ini kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, harus menggunakan berbagai strategi dan daya untuk mendorong masyarakat dan orang tua siswa menjadi bagian integral dari sistem sekolah, beserta seluruh kegiatannya.

Untuk itu, apabila empat aspek yang dikemukakan diatas dapat terialisasi dan berjalan dengan baik, maka KTSP sebagai otonomi sekolah/madrasah dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Kembali pada otonomi madrasah di atas, selama ini kegiatan pembelajaran fikih di madrasah lebih banyak mengacu pada aspek kognitifnya saja dan kurang memperhatikan aspek afektif dan psikomotornya, sehingga aspek nilai yang terkandung dalam pembelajaran fikih terabaikan. Kurikulum

fikih yang dikembangkan dengan KTSP dituntut untuk menguasai sejumlah kompetensi yang telah ditetapkan secara komprehensif (kognitif, afektif, dan psikomotorik). Tuntutan penguasaan kompetensi tersebut berimplikasi pada proses pembelajaran dan penilaian. Guru harus kreatif untuk mencoba mengembangkan strategi pembelajaran dan penilaiannya.

Melalui pembelajaran fikih pada KTSP yang berorientasi pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor, anak akan lebih banyak mendapat pengalaman dalam hal pemahaman, penguasaan dan pelaksanaan dari nilai-nilai pembelajaran fikih itu sendiri. Implikasi dari ranah-ranah pembelajaran dapat dilihat dari masing-masing ranah tersebut. *Pertama*; ranah kognitif, anak didik yang hanya mendapatkan ranah kognitifnya saja maka anak akan mengejar materi dengan lebih banyak mengingat untuk mendapatkan nilai tinggi pada saat evaluasi. Penguasaan materi dengan cara sebanyak-banyaknya mengingat tujuannya hanya untuk mendapatkan nilai tinggi pada saat evaluasi, padahal anak tidak hanya dituntut menguasai materi secara hapalan tetapi juga bisa mengaplikasikan materi-materi hapal tersebut dalam pengalaman ibadahnya setiap hari. Sebagai contoh, pada materi wudhu, anak tidak hanya dituntut menguasai rukun wudhu tetapi harus bisa melakukan/mempraktekkan cara wudhu.. *Kedua*; ranah afektif, anak yang hanya menguasai ranah ini cenderung asal-asalan melakukan kegiatan ibadah yang bersumber dari pembelajaran fikih. Pada ranah ini, anak tidak hanya dituntut bisa melakukan/mempraktekkan –dalam konteks wudhu di atas- cara berwudhu tapi juga dapat melakukannya dengan baik dan benar menurut

syariat. *Ketiga*, ranah psikomotor yang dalam KTSP fikih disebutkan sebagai *life skill*, anak sadar dan cakap mengamalkan prilaku ibadah dengan baik dan benar tanpa harus dilakukan pengawasan.

Jika ketiga ranah tersebut dapat dikuasai oleh anak yang merupakan amanat dari KTSP pembelajaran fikih di madrasah, maka anak tidak hanya cerdas dalam penilaian evaluasi tertulis tetapi juga cakap dalam pelaksanaan pengalaman ibadahnya sehari-hari.

Pembelajaran fikih di madrasah akan semakin bermakna jika didukung oleh guru yang profesional, kreatif, dan mandiri. Dalam pengembangan silabus, guru yang kreatif akan mengembangkan silabus lebih jauh dari yang digariskan di SKKD dengan memuat *maqasid al-shari'ah*. Misalnya pada materi *t}aharah* dikembangkan dengan memuat mengapa Allah swt. mensyari'at *t}aharah* dan apa tujuan *t}aharah* tersebut, maka siswa akan memiliki kemampuan yang lebih dari tiga ranah pembelajaran di atas. Ternyata Allah swt. memerintahkan *t}aharah* dengan tujuan agar manusia dalam berhubungan dengan sesamanya selalu dalam keadaan bersih baik badan, pakaian maupun tempat yang dipergunakannya. Sehingga mereka merasa nyaman, senang dan bersemangat dalam membina hubungannya. Bisa dibayangkan seandainya kita berkumpul dengan orang-orang yang kotor, bau dan kumal. Tentu perasaan kita tidak nyaman, jijik dan ingin segera berpindah tempat. Prinsip kebersihan ini hendaknya dijadikan tradisi oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik berkenaan dengan badan, pakaian, makanan, pekerjaan, prilaku dan sebagainya. Orang yang penampilan dan prilakunya

bersih maka pasti akan disukai oleh semua orang dan Allah juga pasti menyukainya.

Begitu pula dengan s}alat, Allah SWT. memerintahkan umat-Nya untuk melakukan s}alat pastilah banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Tidak mungkin Allah menyuruh hamba-Nya melakukan sesuatu tanpa manfaat yang ada di balik perintah itu. Adapun manfaat dan hikmah yang dapat dipetik dari perintah salat di antaranya; membersihkan seseorang dari dosa-dosa kecil yang dilakukannya, dapat menenangkan hati dari keluh kesah dan kegelisahan, menjadi cahaya dan bukti bagi pelakunya di hari kiamat, salat lima waktu melatih seseorang untuk disiplin waktu.

Dengan demikian, maka pembelajaran fikih di madrasah tidak hanya sebagai seremonial belaka namun dapat memotivasi siswa untuk melakukan ibadah dan mu'amalah yang sudah diajarkan, mendorong siswa untuk beribadah dengan ikhlas karena mereka menyadari bahwa tujuan utama beribadah itu adalah mengabdikan kepada Allah, dan menumbuhkan rasa patuh kepada Allah serta menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa untuk mengamalkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, inilah ciri khas KTSP yaitu pembelajaran berbasis kecakapan hidup (*life skill*) khususnya kecakapan hidup fiqhiyah siswa. Sehingga, implementasi KTSP mata pelajaran fikih dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri.